

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional dan kompleks yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama pemerintah di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020). Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai kebijakan strategis untuk menurunkan tingkat kemiskinan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertumbuhan ekonomi, serta reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu penghapusan kemiskinan. Namun, keberhasilan penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas pembangunan manusia serta distribusi kesejahteraan yang adil (UNDP, 2022). Oleh sebab itu, diperlukan sinergi kebijakan pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kesejahteraan secara merata.

Dalam konteks pembangunan daerah, kemiskinan masih menjadi tantangan utama karena adanya ketimpangan antar wilayah. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan antar daerah menyebabkan variasi tingkat kemiskinan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan faktor pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi serta kebijakan ketenagakerjaan untuk mengurangi kemiskinan secara efektif (Kharisma et al., 2026). Hal ini menunjukkan pentingnya analisis empiris pada tingkat daerah guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan secara lebih spesifik dan akurat.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki total penduduk terbesar yang ada di Indonesia. Jawa Tengah masih masuk dalam daerah yang mengalami masalah kemiskinan. Banyak program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Namun, data menunjukkan bahwa hasil yang ditorehkan belum dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat secara merata (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	IPM	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2018	11,32	71,12	5,41
2019	10,80	71,73	5,66
2020	11,41	71,87	-2,65
2021	11,25	72,16	3,32
2022	10,77	72,79	5,31
2023	10,47	73,39	4,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan selama periode 2018–2023 menunjukkan tren yang cenderung

menurun, yaitu dari 11,32 persen pada tahun 2018 menjadi 10,47 persen pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan meningkat menjadi 11,41 persen akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kualitas pembangunan yang terjadi di suatu daerah (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Selama periode 2018–2023, IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 71,12 menjadi 73,39. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, semakin tinggi IPM suatu daerah maka semakin besar peluang masyarakat untuk keluar dari kondisi kemiskinan (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024; Sen, 2000).

Selain IPM, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -2,65 persen akibat pandemi COVID-19, kemudian berangsur pulih hingga mencapai 4,98 persen pada tahun 2023. Meskipun demikian, peningkatan

pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan secara proporsional (Mankiw, 2022; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Berikut merupakan tabel Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

Tabel 1.2 Data Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2018–2023

Tahun	Upah Minimum Provinsi
2018	1.486.065
2019	1.605.396
2020	1.742.015
2021	1.798.979
2022	1.812.935
2023	1.958.170

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI

Faktor lain yang juga diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah kebijakan upah minimum. Upah Minimum Provinsi (UMP) berfungsi sebagai standar minimum penghasilan yang diterima pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Selama periode 2018–2023, UMP Jawa Tengah meningkat secara konsisten dari Rp1.486.065 menjadi Rp1.958.170. Secara teoritis, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, pengaruhnya tidak selalu bersifat langsung karena masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal (Mankiw, 2021; Kemnaker RI, 2024).

Meskipun tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan pembangunan antar

kabupaten/kota di Jawa Tengah juga berkontribusi terhadap perbedaan tingkat kemiskinan. Beberapa wilayah perkotaan menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan wilayah pedesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan ekonomi belum mampu menciptakan distribusi pendapatan yang merata serta kesempatan kerja yang setara di seluruh wilayah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Selain itu, peningkatan IPM belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang produktif. Kebijakan upah minimum juga memiliki implikasi yang beragam, karena di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun di sisi lain dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji secara empiris hubungan antara IPM, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, analisis yang mendalam sangat penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan pembangunan manusia dan ketenagakerjaan dalam menurunkan kemiskinan di tingkat daerah.

Kemiskinan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini merupakan permasalahan ekonomi yang bersifat kompleks dan multidimensional. Secara konseptual, kemiskinan dapat dijelaskan melalui pendekatan absolut dan relatif. Pendekatan absolut menekankan pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga seseorang dikategorikan miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Sementara itu, pendekatan relatif melihat kemiskinan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan antar

kelompok masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh faktor struktural seperti ketimpangan pembangunan, akses terhadap sumber daya, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan (Decerf, 2022).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen. IPM mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Menurut teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengakses layanan dasar dan meningkatkan kapasitas diri. Peningkatan IPM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi IPM suatu daerah, maka semakin besar peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan (Sen, 2000).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kemiskinan. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik, khususnya model pertumbuhan Solow, peningkatan output dan investasi akan mendorong peningkatan pendapatan nasional serta menciptakan lapangan kerja baru. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan, sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan (Mankiw, 2022). Selanjutnya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan juga dijelaskan melalui konsep trickle down effect dan pro-poor growth yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bersifat

inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi tidak merata dan disertai ketimpangan distribusi pendapatan, maka dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi terbatas. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu didukung kebijakan yang berorientasi pada kelompok miskin (pro-poor policies) agar mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan (Sahoo & Paltasingh, 2023).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan upah minimum sebagai indikator kesejahteraan tenaga kerja. Teori upah minimum dan efisiensi upah menjelaskan bahwa peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli pekerja, mengurangi ketimpangan, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi pekerja berpenghasilan rendah dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, apabila kenaikan upah minimum tidak diimbangi dengan produktivitas dan kondisi pasar tenaga kerja, maka berpotensi menurunkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran. Oleh karena itu, pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada kondisi ekonomi dan struktur pasar tenaga kerja suatu daerah (Borjas, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan upah minimum memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh (Prehatin & Choiri, 2025) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan regresi linier

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat mampu menurunkan kemiskinan secara efektif. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang menyatakan bahwa peningkatan kapabilitas masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya, penelitian oleh (Aurellia & Sirait, 2026) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan tidak selalu merata. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan struktur ekonomi antar wilayah, sehingga daerah dengan struktur ekonomi yang lebih maju cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dibandingkan daerah yang kurang berkembang. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan ekonometrika panel simultan yang mampu menangkap hubungan kausal dua arah antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Aidha et al., 2025) menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linier berganda dan data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun, dampak kebijakan upah minimum tidak selalu optimal dalam menekan kemiskinan apabila tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan stabilitas pasar tenaga kerja.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan masih bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut secara empiris pada tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah periode 2018–2023. Hal ini karena kebijakan upah minimum tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan trade-off dalam pasar tenaga kerja, terutama terkait pengangguran dan kesempatan kerja. Dengan demikian, bukti empiris tersebut memperkuat bahwa kebijakan upah minimum merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi ekonomi regional, struktur pasar tenaga kerja, serta karakteristik sosial ekonomi masing-masing wilayah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan, hasil yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi dan belum memberikan kesimpulan yang konklusif. Beberapa penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengaruh tersebut relatif lemah atau bahkan tidak signifikan, terutama pada wilayah dengan struktur ekonomi yang belum berkembang. Selain itu, kajian

mengenai pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan juga menunjukkan hasil yang beragam, yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah, kondisi pasar tenaga kerja, serta tingkat industrialisasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), khususnya dalam analisis yang menggunakan pendekatan data panel pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan fokus pada Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari wilayah industri hingga agraris, serta terdiri dari 35 kabupaten/kota yang memungkinkan analisis lebih komprehensif. Selain itu, fluktuasi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah selama periode 2018–2023, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi, menjadi alasan kuat untuk mengkaji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan kontekstual.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah yang memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan. Analisis empiris mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai aspek pembangunan, terutama kualitas

pembangunan manusia, kinerja pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan ketenagakerjaan melalui upah minimum. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2018–2023.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023?
3. Apakah upah minimum (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) , pertumbuhan ekonomi (X_2), dan upah minimum (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dibahas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1) secara parsial terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023.

2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi (X_2) secara parsial terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum (X_3) secara parsial terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1), pertumbuhan ekonomi (X_2) , dan upah minimum (X_3) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teortis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian empiris mengenai hubungan antara pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran dalam upaya

pengentasan kemiskinan, terutama melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta penetapan kebijakan upah minimum yang berkeadilan.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi akademisi, mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya dalam analisis kemiskinan menggunakan pendekatan ekonometrika dan data panel.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1), pertumbuhan ekonomi (X_2) dan upah minimum (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) sebagai variabel utama, sehingga tidak membahas faktor lain seperti pengangguran, inflasi, ketimpangan pendapatan dan investasi.

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin, sedangkan variabel independen meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi (persentase PDRB) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK/UMP).
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta publikasi resmi pemerintah dan instansi terkait lainnya.
4. Objek penelitian terbatas pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 daerah.
5. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2018–2023 dengan metode analisis regresi data panel menggunakan pendekatan ekonometrika.